

Judul : Puan Maharani Ingatkan DPR agar Mawas Diri
Tanggal : Jumat, 03 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Puan Maharani Ingatkan DPR agar Mawas Diri

Puan mewakili seluruh anggota dan pimpinan DPR menyampaikan dukacita kepada keluarga korban jiwa dalam rangkaian unjuk rasa akhir Agustus lalu dan meminta maaf.

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengingatkan kembali soal serangkaian unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah pada akhir Agustus lalu dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (2/10/2025). Peristiwa yang menimbulkan korban jiwa itu menjadi momentum bagi DPR untuk bersikap lebih mawas diri dalam menegakkan demokrasi.

Dalam menyampaikan Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2024-2025, Puan menekankan, serangkaian demonstrasi yang berujung kekerasan dan jatuhnya korban jiwa itu sebagai kemunduran demokrasi dan melukai martabat kemanusiaan. Peristiwa itu, lanjutnya, seharusnya menjadi perenungan bersama.

"Demokrasi sejati hanya dapat tumbuh dalam ruang dialog yang beradab, bukan dalam bayang-bayang kekerasan. Peristiwa tersebut harus menjadi perenungan yang berarti bagi kita. Menjaga demokrasi berarti menjaga harkat martabat manusia, melindungi suara rakyat, dan menolak segala bentuk tindakan yang mencederai nilai kemanusiaan," tuturnya.

Lebih lanjut, Puan mewakili seluruh anggota dan pimpinan DPR menyampaikan dukacita kepada keluarga para korban jiwa dalam rangkaian unjuk rasa tersebut. Setidaknya 10 orang meninggal dan banyak korban luka-luka akibat unjuk rasa

yang berujung kerusuhan itu.

"Momentum itu memang telah berlalu, tetapi meninggalkan hikmah yang sangat penting bagi demokrasi kita. Kita harus mawas diri dan bekerja bersama agar insiden serupa tidak terulang," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) itu.

Adapun pada akhir Agustus lalu, di tengah kerumunan massa yang berunjuk rasa menolak tunjangan bagi anggota DPR, kendaraan taktis polisi melindas Affan Kurniawan, sopir ojek daring. Peristiwa yang menimpa Affan itu memantik sejumlah unjuk rasa di beberapa daerah.

Selain Jakarta, korban meninggal dalam rangkaian unjuk rasa juga terdapat di Yogyakarta, Solo, dan Makassar.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mencatat setidaknya 3.337 orang ditangkap sepanjang 25-31 Agustus 2025. Penangkapan ini terjadi di 20 kota, antara lain Jakarta, Depok, Semarang, Cengkareng, Bogor, Yogyakarta, Magelang, Bali, Bandung, Pontianak, Medan, Sorong, Samarinda, Jambi, Surabaya, dan Malang.

Demokrasi tumbuh

Setelah peristiwa itu terjadi, Puan berharap demokrasi di Indonesia tumbuh semakin matang. Tidak hanya berlandaskan

dialog, tetapi juga dengan penghormatan terhadap kemanusiaan dan semangat gotong royong yang memperkuat bangsa.

Puan mengingatkan, DPR adalah pelaksana amanat tertinggi dari kedaulatan rakyat. Amanat tersebut harus dijalankan melalui kerja nyata dan mewujudkan keberpihakan kepada rakyat.

Kedaulatan rakyat itu, lanjut Puan, diuji dengan berbagai permasalahan. Rakyat menuntut hidup layak dan bermartabat, ketersediaan lapangan kerja, layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengentasan dari kesenjangan sosial-ekonomi dan pembangunan antardaerah.

Rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. DPR hanya pelaksana amanat itu. Inilah saatnya bagi kita untuk merefleksikan sejauh mana kita telah menjalankan amanat yang dipercayakan rakyat kepada kita," kata Puan.

Terima kritik

Dalam mengentaskan amanat itu, anggota DPR tidak jarang menerima kritik dari publik. Kritik bisa datang lewat berbagai cara, mulai dari halus, keras, hingga kasar. Penyampaian kritik juga dilakukan dengan berbagai bentuk, mulai dari demonstrasi di depan Gedung DPR, unjuk rasa di beberapa daerah, hingga unggahan di media sosial.

Puan menegaskan, kritik

yang datang tersebut harus didengar dan dijawab dengan kerja nyata. Jangan sampai anggota DPR hanya sibuk membicarakan diri sendiri tanpa memedulikan kondisi rakyat.

"Apa pun cara dan bentuknya, semua (kritik) itu tetap harus kita dengar sebagai suara rakyat. DPR harus menjawabnya dengan kerja nyata. Kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita. Apalagi kalau kita sibuk membicarakan diri kita sendiri," tuturnya.

Oleh karena itu, Puan meminta maaf kepada masyarakat jika DPR selama ini belum menjalankan tugas dengan sempurna. Dia juga menekankan, setiap kritik yang masuk akan menjadi pendorong bagi pihaknya untuk menyempurnakan diri dan bertransformasi lebih baik untuk memenuhi amanat rakyat.

"Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna," ujarnya.

Segera jawab tuntutan

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, mengapresiasi kepedulian Puan Maharani dalam serangkaian demonstrasi se-

but. Namun, dia juga mengingatkan DPR untuk segera menjawab tuntutan publik agar bisa bekerja lebih baik.

"Baik sekali Bu Puan menjadikan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu sebagai pengingat agar anggota DPR lebih mawas diri. Akan tetapi, aksi nyata untuk memperlihatkan keinginan DPR menjawab tuntutan publik tampaknya belum juga terlihat," ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Lucius menyoroti proses pembuatan undang-undang oleh DPR yang belum mencerminkan kebutuhan rakyat. Dia kemudian menyayangkan hanya dua dari 52 rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional 2025 berhasil disahkan.

Bahkan, RUU Perampasan Aset yang ditunggu publik juga belum terlihat akan dibahas.

"Jadi DPR tampak tetap mendahulukan apa yang tidak sungguh dibutuhkan rakyat (RUU BUMN). DPR memang memasukkan RUU Perampasan Aset sesuai harapan publik, tetapi di saat bersamaan DPR memasukkan juga revisi UU BUMN yang kedua kalinya diubah tahun ini," tuturnya.

Oleh karena itu, Lucius meminta keseriusan dari DPR untuk berbenah. Aspirasi dari masyarakat, lanjutnya, tidak hanya sekadar jadi catatan kuantitatif, tetapi juga harus diperjuangkan karena itu suara rakyat. (RTG)